



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS SOSIAL**

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2023**



**DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU
Jl. R.A. Kartini no. 14 Karang panjang
AMBON**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan tahunan memiliki arti yang penting dan strategis dalam kerangka mewujudkan optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Maluku guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sebagai dokumen perencanaan, RENJA ini tidak akan mempunyai arti jika tidak digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan. Oleh sebab itu, kepada semua pihak terkait khususnya aparatur Dinas Sosial Provinsi Maluku dimintakan untuk dapat mengimplementasikannya secara maksimal guna meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2020 khususnya, serta mewujudkan VISI dan MISI Pembangunan Tahun 2020 – 2024 pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Ambon, April 2022

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Maluku,



Sartono, Pinning, S.H, M.Kn
NIP. 196205231993031004

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD
- II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program & Kegiatan Tahun 2023

- III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- III.2. Tujuan dan Sasaran
- III.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023
 - A. Target Sasaran Strategis Tahun 2023
 - B. Target Program dan Kegiatan Tahun 2023

Bab VI. Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan terhadap NKRI telah dilakukan semenjak zaman orde baru sampai sekarang (reformasi). Pembangunan yang dilakukan terdiri dari beberapa aspek yang dianggap sangat penting terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu meliputi Bidang Ekonomi, Bidang Politik dan Hukum, Bidang Sosial dan Budaya, Bidang Pendidikan serta pembangunan terhadap sarana dan prasarana negara.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan dunia ilmu teknologi, yang berhubungan dengan semakin meluasnya jaringan informasi yang berkembang di hampir seluruh lapisan masyarakat, membuat nilai-nilai moral, etika dan budaya semakin tersudut oleh majunya dunia globalisasi.

Harga kebutuhan pokok yang terus melejit naik, membuat semakin menurunnya daya beli masyarakat, seakan-akan memperkeruh upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan penanganan masalah-masalah sosial.

Permasalahan sosial yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya selalu memberikan indikasi bahwa penanganan permasalahan kesejahteraan sosial selalu terabaikan, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Padahal tanggung jawab dalam penanganan masalah-masalah sosial merupakan tanggung jawab semua pihak. Sesuai amanat-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah Provinsi Maluku yang baru keluar dari keterpurukan akibat kondisi masa lalu selalu berupaya dengan sekuat tenaga untuk kembali ke kondisi yang aman dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi Pemerintah daerah Tahun 2019-2024, yaitu “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan” dengan misi, yaitu :

1. Birokrasi yang akomodatif, komunikatif, koordinatif, kolaboratif, bersih dan melayani
2. Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan gratis berbasis gugus pulau

3. Industrialisasi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM)
4. Pengembangan infrastruktur untuk koneksitas gugus pulau
5. Optimalisasi industri pertanian dan perikanan
6. Keamanan dan kepastian hukum untuk investasi dan pariwisata
7. Pengembangan pemuda kreatif dan berolahraga berprestasi
8. Pengembangan dan revitalisasi budaya maluku
9. Jaminan layanan kesehatan merata berkualitas dan gratis

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 merupakan amanat dan tindak lanjut dari pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang berfungsi menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan sehingga sinkron ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), karena memuat kebijakan Pembangunan daerah satu tahun dan menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 di bidang sosial, Dinas Sosial Provinsi Maluku berpedoman pada beberapa peraturan umum, yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan tahun 2023 sesuai dengan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku untuk satu tahun mendatang yang bertujuan :

1. Menjadikan renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
2. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Sosial Provinsi Maluku.
3. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Provinsi Maluku yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja merupakan acuan dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku. Dalam rencana kerja mengandung analisis capaian kinerja organisasi yang akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah penyimpangan kinerja yang menjadi dasar dalam perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2023, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Mengacu Rencana Strategi Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024, ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta strategi yang jelas dan tepat, sehingga diharapkan instansi pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

1. VISI

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang dijiwai Rasa Kesetiakawanan Sosial, Oleh dan Untuk Masyarakat di Maluku Secara Berkelanjutan “

2. MISI

Visi Dinas Sosial Provinsi Maluku tersebut diatas selanjutnya dijabarkan kedalam Misi, yaitu :

1. Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Sumber Daya Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial.
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial secara konprehensif.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial secara profesional.

3. TUJUAN dan SASARAN

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen institusi sosial dan sumber daya penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah :

1. Meningkatnya kualitas lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya fungsi dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar partisipan.
3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin, keluarga miskin dan komunitas adat terpencil melalui pemberdayaan sosial.
4. Terlayaninya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS anak, lanjut usia terlantar, tuna sosial, eks korban NAPZA dan penyandang disabilitas melalui sistem panti dan luar panti.
5. Terlindunginya dan tertanganinya korban bencana, korban tindak kekerasan dan orang terlantar.

4. KEBIJAKAN

Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial.

- (b) Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial.
- (c) Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta koordinasi.
- (d) Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (e) Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran- sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dan prioritas untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

5. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta mengacu pada kebijakan di atas, dipandang perlu meningkatkan kinerja aparatur serta mengembangkan strategi dengan cara merumuskan dan menetapkan program-program kerja serta kegiatan-kegiatan organisasi. Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Sosial Provinsi Maluku telah melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan serta 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan prioritas guna penanggulangan kemiskinan, mengembangkan sumber daya aparatur serta meningkatkan sarana dan prasarana.

Program tersebut antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Maksud dari program ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terfokus pada urusan administrasi perkantoran. Sasaran dari program ini adalah tercapainya dukungan dalam pelayanan administrasi guna kelancaran pelayanan perkantoran. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi 6 (Enam) kegiatan, yaitu :

- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 2) Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Adminstrasi Kepegawaian perangkat daerah
- 4) Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pemberdayaan Sosial.

Program ini bertujuan untuk menyediakan pemberdayaan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi yang diimplementasikan melalui kegiatan :

1. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.
2. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi

c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi warga deportan untuk dikembalikan ke daerah asal yang diimplementasikan melalui kegiatan :

- 1) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota Asal.

d. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas pemberian pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial serta kesetiakawanan sosial dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas terlantar di dalam panti
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
- 4) Rehabilitasi sosial dasar gelandangan terlantar di dalam panti
- 5) Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti

e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Program ini bertujuan untuk menyediakan fasilitasi bantuan sosial keluarga serta pengelolaan fakir miskin lintas daerah kabupaten kota yang diimplementasi melalui kegiatan :

1. Pengangkatan anak anar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

f. Program Penanganan Bencana

Program ini bertujuan untuk menyediakan permakanaan dan pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial yang diimplementasi melalui kegiatan

1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Provinsi Maluku

g. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi yang diimplementasikan melalui kegiatan :

- 1) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

6. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

Selama Tahun Anggaran 2022, Dinas Sosial Provinsi Maluku telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Meskipun keberhasilan belum terwujud secara optimal, namun kinerja yang diberikan sudah bergeser kearah kemajuan. Dengan didukung sumber daya aparatur yang memiliki potensi baik walaupun sarana dan prasarana yang kurang memadai, penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pelaksanaan pembangunan dibidang sosial lebih difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang rentan dan mengalami masah sosial yang dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Secara keseluruhan jumlah PMKS di Provinsi Maluku adalah 19 PMKS dari 27 Jenis PMKS, dan jumlah ini dapat di kategorikan menjadi 7 (tujuh) kelompok, yaitu : Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan (penyandang disabilitas), Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Diskriminasi dan Eksploitasi.

Sampai dengan saat ini Dinas Sosial Provinsi Maluku telah mempunyai Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Perkembangan masalah kesejahteraan sosial berjalan seiring dengan lajunya pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi serta politik keamanan yang mana telah memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat.

Menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari kenaikan harga dan juga meningkatnya teknologi informasi memberikan implikasi terhadap peningkatan permasalahan sosial. Hal lain yang dirasakan juga pengaruhnya adalah akselerasi perubahan struktur sosial yang timpang, yang berujung pada ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk dapat mengimbangi perubahan ini. Akibatnya, bermunculan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial seputar kehidupan masyarakat baik itu individu, keluarga, kelompok/komunitas, maupun masyarakat.

Kompleksitas dan intensitas permasalahan sosial ini akan menjadi beban dan akan meningkat kuantitasnya, jika upaya-upaya pencegahan, dan penanganan, tidak segera ditangani oleh pemerintah daerah, masyarakat dan juga stakeholder yang merupakan mitra pemerintah dalam penanganan permasalahan social.

Sesuai dengan kelompok sasaran prioritas penanganan, maka di Provinsi Maluku terdapat 6 (enam) kelompok sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu :

1. Kemiskinan
2. Keterlantaran
3. Kecacatan
4. Keterpencilan
5. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku
6. Korban Bencana

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan SKPD maka telah sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial untuk Tahun 2023. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capainnya yang merupakan represenatatif tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Maluku. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capainnya.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Sosial Provinsi Maluku Provinsi Maluku yang tugas pokok dan fungsinya menyentuh langsung dengan kepentingan masyarakat, dalam mendukung arah dan kebijakan telah menetapkan rencana program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

III.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2020-2024, yaitu **“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan ”**, dan untuk mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam visi tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah Maluku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Misi Dinas Sosial Provinsi Maluku selanjutnya dijabarkan kedalam Misi, yaitu :

1. Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Sumber Daya Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial.
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial secara konprehensif.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial secara profesional.

Penjelasan arti dan makna dari jabaran misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial lebih di arahkan pada peningkatan manajemen institusi sosial dan aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial melalui penataan manajemen yang profesional, serta penyelenggaraan diklat umum dan teknis.
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial secara konprehensif adalah suatu upaya meningkatkan peran aktif masyarakat, dan dunia usaha sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah-masalah sosial.

3. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial adalah suatu upaya penanganan masalah-masalah sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui *perlindungan sosial*, *rehabilitasi sosial* dengan sistem panti maupun non panti dan *pemberdayaan sosial* dengan mengedapankan pola penanganan dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial (*social work*).

III.2. TUJUAN DAN SASARAN

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen institusi sosial dan sumber daya penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.

SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah :

- (1) Meningkatnya kualitas lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.
- (2) Meningkatnya fungsi dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar partisipan.
- (3) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin, keluarga miskin dan komunitas adat terpencil melalui pemberdayaan sosial.
- (4) Terlayannya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS anak, lanjut usia terlantar, tuna sosial, eks korban NAPZA dan penyandang disabilitas melalui system panti dan luar panti.
- (5) Terlindunginya dan tertanganinya korban bencana, korban tindak kekerasan dan orang terlantar.

Dalam Rencana Kerja tahun 2022, Dinas Sosial Provinsi Maluku berupaya untuk merealisasikan tujuan, sasaran dimaksud melalui program – program yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan.

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka pada Tahun 2023 setiap program dijabarkan kedalam beberapa kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 7. Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- c. Program Pemberdayaan Sosial.
 - 1. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
 - 2. Penerbitan Izin Pengumpulan sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi
- d. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
 - 1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Provinsi Untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal.
- e. Program Rehabilitasi Sosial
 - 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.
 - 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.
 - 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti.
 - 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Terlantar dan Pengemis di Dalam Panti.
 - 5. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA.

- f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1. Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
 - 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
- g. Program Penanganan Bencana
 - 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- h. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - 1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

BAB VI

P E N U T U P

Secara umum berbagai program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku dalam Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari kebijaksanaan dan program yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun agar dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian tujuan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial.

Diharapkan Renja ini akan dapat menjawab tugas dan fungsi Dinas Sosial pada Tahun 2023 sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan kedepan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan penanganan masalah sosial yang ada dimasyarakat.

Ambon, April 2022

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Maluku,



Sartono Pinning S.H.M.Kn
NIP. 196205231993031004

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
PROVINSI MALUKU

SKPD Dinas Sosial Provinsi Maluku
GUGUS

KODE	PRIORITAS /FOKUS	GUGUS PULAU	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2024	
					Kab/ Kota	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Moneva dan Data Publikasi Pembangunan Sosial serta perjadiin dalam dan luar daerah	11 Kab/Kota	4 Lap	1.547.500.000		4 Lap	1.600.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian khas Maluku (cele)	Ambon	110 Orang	315.000.000		110 Orang	350.000.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan Aparatur Disiplin UPTD	Ambon	2 Keg	250.000.000		2 Keg	275.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik penerangan bangunan kantor	Ambon	15 PKT	85.000.000		15 PKT	90.000.000
			Penyediaan Barang Cetakaaan dan Penggandaan	Untuk kelancaraan pekerjaan kantor	Ambon	2 Pkt	100.000.000		2 Pkt	125.000.000
			Penyediaan Logistik Kantor	Untuk kelancaraan pekerjaan kantor	Ambon	20 Pkt	200.000.000		20 Pkt	225.000.000
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Ambon	2 Lap	175.000.000		20 Pkt	200.000.000

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah, dalam daerah dan forum SKPD	Ambon	4 Lap	1.350.000.000		4 Lap	1.360.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas untuk kelancaran kantor	Ambon	7 Unit	540.000.000		5 Unit	545.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya dana untuk perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Ambon	106 Unit	345.000.000		106 Unit	346.000.000
			Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Untuk kelancaran pekerjaan kantor	Ambon	35 Unit	180.000.000		5 Unit	200.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya dana untuk kelancaran pekerjaan kantor	Ambon	2 Lap	85.000.000		2 Lap	90.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana untuk kelancaran pekerjaan kantor	Ambon	7 Lap	310.000.000		2 Lap	320.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya dana untuk jasa layanan umum kantor	Ambon	4 Lap	1.376.828.800		2 Lap	1.400.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Tersedianya dana untuk jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Ambon	25 Unit	485.000.000		25 Unit	490.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya dana untuk pemeliharaan / rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, TMP, Rumah Singgah, dan monumen nasional	Ambon	4 Unit	485.000.000		4 Unit	500.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya dana untuk pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Ambon	35 Unit	120.000.000		35 Unit	130.000.000

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
			Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi							
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Forum Koordinasi TKSK	Ambon	118 Org	200.000.000		118 Org	210.000.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Seleksi Pilar-Pilar Berprestasi, Temu Forum Karang Taruna,Puskesmas dan RBS SLRT	11 Kab/Kota	7 Keg	3.421.560.000		7 Keg	3.522.000.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Pembentukan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Provinsi	11 Kab/Kota	30 Org	85.000.000		30 Org	90.000.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi			30 Keluarga	390.000.000		30 Keluarga	410.000.000
			Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam Satu Daerah Provinsi							
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	Terselenggaranya Pemantauan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang di 11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	6 Dok	75.000.000	100	6 Dok	80.000.000
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MISGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal							

			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terfasilitasi Pemulangan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan	Ambon	100 Org	100.000.000		100 Org	110.000.000
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti							
			Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Kebutuhan Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti	Ambon	144 Org	290.000.000		144 Org	295.000.000
			Penyediaan Permakanan	Tersedianya Kebutuhan Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti	Ambon	135 Org	170.000.000		135 Org	175.000.000
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti							
			Penyediaan Permakanan	Tersedianya Kebutuhan Anak Terlantar dalam Panti	Ambon	1094 Org	675.000.000		1094 Org	680.000.000
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti							
			Penyediaan Sandang	Tersedianya pakaian harian lanjut usia terlantar dalam panti	Ambon	50 Org	110.000.000		50 Org	120.000.000
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelendangan terlantar dan pengemis							
			Penyediaan Sandang	Tersedianya pakaian harian Gelandangan terlantar dan pengemis terlantar dalam panti	Ambon	20 Org	30.000.000		20 Org	35.000.000
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti							

			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Terselenggaranya Kegiatan Penguatan Kapasitas LKS Rehsos, Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan bagi Penyandang Kesos, Assesment Kebutuhan Penerima Pelayanan dalam Panti, Gerakan Stop Pemasungan, Peningkatan Kesetiakawanan Nasional	Ambon	6 Dok	625.000.000		6 Dok	650.000.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
			Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal							
			Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Kegiatan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Ambon	20 Orang	75.000.000		15 Orang	80.000.000
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi							
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Rakor PKH	Ambon	1 Keg	75.000.000		1 Keg	80.000.000
			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Pendamping KUBE, Pemutahiran DTKS dan Assesment Kebutuhan Masyarakat miskin Perkotaan, Perdesaan dan Pesisir, Sosialisasi Stunting	Ambon	4 Keg	1.300.000.000		4 Keg	1.315.000.000
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pemberian Bantuan KUBE kepada Masyarakat dan Pemberdayaan KUBE untuk Keluarga Stunting serta KUBE desa sejahtera mandiri	Ambon	87 Klmpk	3.750.000.000		87 Klmpk	3.750.000.000
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi							

			Penyediaan Permakanan	Tersedianya makanan siap saji bagi Korban Bencana	3 Kab/Kota	1500 Org	200.000.000		1500 Org	210.000.000
			Penyediaan Penampungan Pengungsi	Tersedianya Kebutuhan Penampungan Pengungsi (KSB)	11 Kab/Kota	11 Unit	600.000.000		11 Unit	650.000.000
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Terlaksananya Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana, Pemantapan Petugas Shelter, Manajemen Pengungsi, Tanggap Darurat Pasca dan Transisi Bencana, Penguatan SDM Psikososial Penanggulangan Bencana Keserasian Sosial, Pemantapan Tenaga Pelopor Perdamaian, Peningkatan Kapasitas TAGANA, TAGANA Masuk Sekolah, dan Forum TAGANA	11 Kab/Kota	8 Keg	950.000.000		8 Keg	975.000.000
			penanganan khusus bagi kelompok rentan	Terpenuhinya Kebutuhan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3 Kab/Kota	100 Org	90.000.000		100 Org	95.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi							
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di TMP dan J. Leimena	Ambon	7 Keg	1.140.000.000		7 Keg	1.150.000.000
TOTAL ANGGARAN							22.300.888.800			22.928.000.000